



Pengusaha Galian C di Karangasem Tunggak Pajak Rp 9 Miliar

● Badan Pengelola Keuangan dan Aset Beri Kelonggaran untuk Mencicil

AMLAPURA, TRIBUN

BALI - Tunggakan pajak dari sektor Galian C oleh pengusaha wajib pajak mencapai Rp 9 miliar. Tunggakan ini terhitung sejak tahun 2017. Rata-rata tiap wajib pajak menunggak satu hingga enam bulan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem, I Nengah Mindra menjelaskan, alasan wajib pajak menunggak karena banyak pembeli masih berutang. Ini jadi alasan mereka tidak mampu membayar pajak.

"Alasan lainnya karena kondisi usaha sepi semenjak erupsi Gunung Agung. Tunggakannya memang banyak. Kami sudah melakukan pendekatan ke wajib pajak supaya secepatnya dibayar," kata I Nengah Mindra belum lama ini.

Dari hasil pendekatan-nya, wajib pajak diberikan kelonggaran untuk mencicil tunggakan sampai lunas.



TRIBUN BALI/SAIFUL ROHIM

Langkah ini ditempuh demi meringankan wajib pajak. Petugas juga telah melayangkan surat penegasan wajib pajak di sektor galian untuk penuhi kewajibannya. Sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral bukan logam.

Bila dalam jangka waktu satu tahun wajib pajak tidak memenuhi kewajiban, maka wajib pajak dikenai sanksi ad-

Alasan lainnya karena kondisi usaha sepi semenjak erupsi Gunung Agung. Tunggakannya memang banyak. Kami sudah melakukan pendekatan ke wajib pajak supaya secepatnya bisa dibayar.

I Nengah Mindra

Kepala BPKAD Karangasem

ministrasi. Pengurusan izinnya akan diperhambat. "Kami terus melakukan sosialisasi ke pengusah agar tetap bayar pajak. Kami dekati pelan-pelan, tak boleh saklek. Pengusaha kami berika untuk mencicil," kata Mindra.

Langkah ini diambil karena usaha sektor galian C sepi sejak Gunung Agung Level IV atau Awas. Sedangkan biaya pengeluaran karyawan cukup

tinggi. "Pengusaha itu mitra kerja kami. Yang kami berikan kelonggaran bayar pajak yakni pengusaha yang berizin. Mulai skarang mereka sudah mulai mencicil," imbuhnya.

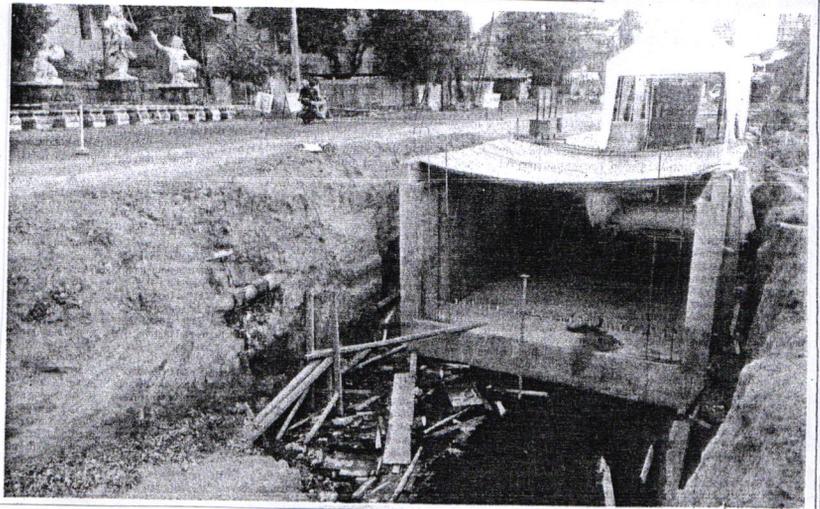
Pajak galian C merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Karangasem. Target PAD dari galian C sekarang mencapai Rp 55 miliar. Namun yang terealisasi baru sekitar Rp 7,1 miliar. (ful)

Edisi : Senin 7 Mei 2018

Hal : 6



Relokasi Pipa Habiskan Rp 1,7 M



■ Pelebaran Jalan Imam Bonjol Mangkrak 2 Bulan

■ PDAM Berdalih Tak Ada Dana

DENPASAR, TRIBUN BALI

- Sudah dua bulan pengerjaan proyek pelebaran Jalan Imam Bonjol di sisi selatan mangkrak. Ini dikarenakan terkendala dua pipa PDAM yang membentang 528 meter di lokasi pemasangan *box culvert*. PDAM Denpasar berdalih tidak memiliki anggaran merelokasi dua pipa yang menelan dana Rp 1,7 miliar itu.

Rencananya, pipa tersebut akan direlokasikan ke sisi timur jalan. Namun kapan akan direlokasi pun saat ini masih terkendala anggar-

an. Keberadaan pipa yang menghambat ini mendapat keluhan dari pekerja proyek pelebaran jalan Imam Bonjol, karena sudah dua bulan belum ada penanganan dari pihak terkait.

Salah satu Pembantu Pelaksana Proyek Pelebaran Jalan Imam Bonjol yang ditemui di lokasi proyek Pelebaran Jalan Imam Bonjol mengatakan, keberadaan pipa PDAM ini memperlambat pengerjaan proyek. Selama dua bulan pengerjaan pemasangan *box culvert* di sisi selatan dihentikan sementara.

Direktur Utama PDAM Denpasar, Ida Bagus Gede Arsana mengaku PDAM sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merelokasikan pipa.

Dana untuk relokasi pipa ini menelan anggaran sekitar Rp 1,7 miliar. Ia berdalih pihaknya tidak memiliki ang-

Pekan Ini Diputuskan

KEPALA PPK Proyek Pelebaran Jalan Imam Bonjol, Ida Bagus Made Artamana mengatakan dalam pekan ini akan diputuskan siapa yang membiayai relokasi tersebut.

"Seminggu kedepan sudah ada keputusan. Intinya pasti dipindah. Tapi oleh siapa dan dengan biaya siapa, itu BPKP yang memberikan opsi dan arahan. Target kita sampai Juli sudah selesai direlokasi," ujarnya.

Namun secara matematis pihaknya optimistis proyek yang menelan anggaran Rp 181 miliar ini akan rampung September 2018, sebelum helatan IMF-Bank Dunia Oktober mendatang.

Pihaknya tetap mengacu target kontrak hingga akhir Desember 2018. Progres proyek pelebaran jalan Imam Bonjol sudah mencapai 30 persen pengerjaan. (opu)

Edisi : Selasa, 15 Mei 2018

Hal : 8



Sambungan

garan sebesar itu untuk merelokasi pipa yang membentang sepanjang 528 meter tersebut.

"Kami sudah koordinasikan dengan PU (dinas pekerjaan umum) dan pihak terkait, kalau dana Rp 1,7 miliar ini kami di PDAM tidak ada. Sehingga regulasinya PU yang menjembatani. Jadi semua pelaksanaannya (relokasi pipa), termasuk anggaran itu regulasinya di PU semua," ujarnya, Senin (14/5).

Kepala PPK Proyek Pelebaran Jalan Imam Bonjol, Ida Bagus Made Artamana mengatakan, keberadaan pipa PDAM tersebut membuat pengerjaan proyek *minus* 2,5 persen, karena pihaknya tidak bisa melanjutkan pe-

ngerjaan di sisi selatan. Untuk kapan akan direlokasi pun saat ini masih dalam tahap audit oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

Hal ini karena kata dia pemilik pipa PDAM tidak mempunyai anggaran untuk merelokasi dua pipa yang masing-masing memiliki diameter 8 inch dan 12 inch tersebut. Sebagai opsi, pihaknya pun mengajukan agar pipa tersebut direlokasi dengan menggunakan anggaran sisa lelang proyek pelebaran jalan Imam Bonjol. Namun apakah disetujui atau tidak, saat ini masih menunggu persetujuan dari BPKP. (opu)

Edisi : Selasa, 15 Mei 2018

Hal : 7



2 Proyek Sisakan Utang Rp 31,6 M

- Pemasangan Hotmix dan Drainase Sejak Tahun 2016
- Program Prioritas Bupati Bangli di Jalan Kabupaten

BANGLI, TRIBUN BALI - Proyek sejumlah jalan kabupaten yang menjadi program prioritas Bupati I Made Gianyar ternyata meninggalkan utang. Contohnya pengerjaan hotmix di tahun 2016. Dari nilai proyek Rp 10 miliar, yang baru dibayarkan Rp 500 juta. Pemkab masih ngutang Rp 9,5 miliar.

Sekda Bangli, Ida Bagus Giri Putra mengatakan, sesuai dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), utang senilai Rp 9,5 miliar tersebut masuk menjadi utang daerah. Rencananya pembayarana akan dilakukan pada APBD Perubahan ini. "Kami sudah cantumkan nominal tersebut sebagai utang daerah untuk dibayar pada APBD Perubahan," ucapnya, Rabu (16/5).

Ia menjelaskan, utang tersebut merupakan sisa pembayaran dari paket kegiatan hotmix pada tahun 2016. Lantaran pihak rekanan tidak mampu menyelesaikan tepat waktu, sesuai dengan ketentuannya pembayaran dilakukan berdasarkan persentase pengerjaan yang berhasil diselesaikan.

Pembayaran di perubahan 2018 nanti tidak hanya kegiatan pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 9,5 miliar saja. Tahun anggaran 2017 juga terdapat kegiatan yang juga masuk menjadi utang

daerah. Seperti pembangunan drainase dan paket hotmix lainnya dengan total mencapai Rp 22,1 miliar. Jadi total pembayaran utang di (APBD) Perubahan mencapai Rp 31,6 miliar.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri keuangan (PMK) 243 tahun 2015 tentang perubahan PMK Nomor 194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terealisasi sampai akhir tahun anggaran, Giri Putra mengatakan salah satu klausulnya mengisyaratkan apabila pelaksanaannya melewati tahun anggaran berjalan, penyelesaiannya dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

"Biasanya rekanan diberikan 60 hari masa penyelesaian, di tahun anggaran berikutnya. Jika dari masa waktu perjanjian tersebut tidak mampu diselesaikan, maka persentase yang diselesaikan akan diopname dengan dikurangi denda, serta rekanan diberikan sanksi yang lebih berat berupa *blacklist*," tuturnya.

"Kegiatan ini selesai pada Desember. Sedangkan saat itu, APBD induk telah diketok palu pada 30 November sehingga tidak bisa dianggarkan pada (APBD) induk. Sedangkan pada pembahasan APBD perubahan kami juga masih ragu sehingga tidak kami anggarakan lantaran PMK tersebut baru keluar," sambung dia. **(mer)**

Rekanan Lakukan Wanprestasi

PELUNASAN yang molor hingga satu tahun ini, dari sisi rekanan pun tidak diperbolehkan menuntut. Sebab diketahui rekanan melakukan wanprestasi atau tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang disepakati. Bila menuntut, pada saat itu pula rekanan akan dikenakan *blacklist*.

Sekda Bangli, Ida Bagus Giri Putra tidak

menampik pihaknya sempat ragu dalam menganggarkan pelunasan kegiatan tersebut pada anggaran perubahan tahun 2017 sehingga pelunasan kegiatan senilai Rp 9,5 miliar belum bisa dilakukan hingga kini. "Akhirnya atas arahan dari BPK pada pemeriksaan di tahun 2017, pembayaran tersebut diperbolehkan dalam bentuk utang daerah," imbuhnya. **(mer)**

Edisi : Kamis, 17 Mei 2018

Hal : 7



Giri Prasta Serahkan Hibah Rp 358 Juta

MANGUPURA, TRIBUN BALI - Warga Banjar Batu Bayan, Desa Taman, Kecamatan Abiansemal, menggelar karya ngenteg linggih, melaspas, mendem pedagingan, dan caru rsi gana, Rabu (16/5). Karya digelar usai rampungnya pembangunan Balai Banjar dan Pura Melanting setempat.

Upacara dihadiri Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta didampingi anggota DPRD Badung I Nyoman Dirgayusa, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Badung I Bagus Alit sucipta, Camat Abiansemal I Gusti Ngurah Surya Jaya beserta Tripika Kecamatan serta tokoh masyarakat. Untuk meringankan beban masyarakat, Giri Prasta menyerahkan bantuan dana upakara sebesar Rp 358 juta.

Giri Prasta menuturkan, kebanyakan waktu masyarakat habis di adat. Selain itu dana masyarakat juga banyak habis untuk melakukannya. "Oleh karena itu pemerintah selalu



ISTIMEWA

MUSPA - Bupati Giri Prasta muspa saat karya ngenteg linggih di Banjar Batu Bayan, Desa Taman, Kecamatan Abiansemal, Rabu (16/5).

hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meringankan beban krama," ujarnya.

Di samping itu, Giri Prasta juga menyampaikan pembangunan di Kabupaten Badung berdasarkan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang mencakup lima program skala prioritas.

Program tersebut meliputi pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosi-

al dan tenaga kerja, seni, adat, agama dan budaya, serta pariwisata. Sementara itu, Ketua panitia karya, I Nyoman Sukadana mengatakan, Banjar Batu Bayan terdiri dari 46 warga pengarep dan 88 warga pengele. Pelaksanaan karya ngenteg linggih yang puncaknya hari ini (kemarin) mendapat dukungan penuh dari Bupati Badung yang memberikan dana hibah sebesar Rp 358 juta. (*)